



Judul : DPR buka ruang diskresi pengelolaan APBN
Tanggal : Selasa, 06 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

DPR Buka Ruang Diskresi Pengelolaan APBN

WAKIL Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Muhidin Muhammad Said memastikan parlemen sejak awal pandemi covid-19 telah memberikan diskresi kepada pemerintah dalam mengelola APBN. Namun, hal itu tidak serta-merta menggugurkan fungsi pengawasan DPR.

"Itu hanya pengalihan sementara dan itu tetap dipertanggungjawabkan. Itu tetap dalam kontrol," ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Diskresi pengelolaan APBN, kata Muhidin, diberikan kepada pemerintah dalam kondisi darurat seperti pandemi covid-19 dan krisis ekonomi. Hal itu dirasa perlu agar pengambil kebijakan dapat merespons kebutuhan anggaran dengan cepat demi melindungi masyarakat.

Selama pandemi covid-19, misalnya, pemerintah dapat menggeser anggaran untuk membantu masyarakat dan dunia usaha yang terdampak oleh wabah. Penggeseran anggaran itu tak memerlukan persetujuan DPR seperti dalam situasi normal.

"Jadi, kemudahan untuk memindahkan anggaran karena memang situasi dan kondisi ekonomi ke depan itu ketidakpastiannya tinggi."

Aviliani

Ekonom Senior Indef

"Ada namanya *refocussing*, itu tidak perlu meminta izin (dari DPR). Itu bisa dilakukan karena kalau kita lakukan persetujuan lagi, itu prosesnya panjang, sedangkan rakyat sangat membutuhkan," ujar Muhidin.

Kendati tak memerlukan izin parlemen, pemerintah tetap harus mempertanggungjawabkan setiap uang negara yang digeser atau dikeluarkan.

Sebelumnya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance

(Indef) Aviliani menilai APBN memerlukan diskresi untuk menghadapi situasi dan kondisi penuh ketidakpastian di masa depan. Diskresi atau kemudahan untuk memindahkan anggaran diperlukan untuk memberikan ruang guna mengubah kebutuhan anggaran sesuai kondisi yang ada.

"Menurut saya, APBN itu harus ada diskresi. Jadi, kemudahan untuk memindahkan anggaran karena memang situasi dan kondisi ekonomi ke depan itu ketidakpastiannya tinggi. Kemudian kebutuhan jangka pendeknya itu bisa berubah-ubah," katanya.

Aviliani menilai sistem yang saat ini digunakan, saat anggaran diporsikan dan pemindahannya membutuhkan persetujuan hingga sekitar tiga bulan, akan tidak efektif untuk bisa mengatasi masalah yang mungkin dihadapi di masa depan.

Ia juga menyebut diskresi dibutuhkan untuk mempercepat proses atau kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat kelas bawah. Misalnya saja seperti bantuan sosial. (Mir/E-2)